

KETERKAITAN ANTARA KUALITAS GOVERNANCE DAN STABILITAS NEGARA: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA NEGARA-NEGARA SKANDINAVIA DAN INDONESIA

Kezia Marlinata Sinaga¹, Reivania Calista Rizanul², Princess Ngozi Chika³,
Muhammad Ibaadurrahman⁴, Fatkhuri⁵

2310413086@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310413041@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310413081@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
fatkhuri@upnvj.ac.id⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kualitas governance dan stabilitas negara dengan membandingkan negara-negara Skandinavia, yang dikenal memiliki praktik tata kelola yang baik, dengan Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam governance. Governance melibatkan aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia mendapatkan skor indeks persepsi korupsi di atas 80, sementara Indonesia hanya mencapai 34. Temuan ini mengindikasikan bahwa governance yang efektif di Skandinavia berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial yang tinggi. Sebaliknya, tantangan seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan. Penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian praktik-praktik governance yang dapat diadaptasi dari negara-negara Skandinavia untuk meningkatkan tata kelola dan stabilitas di Indonesia, memberikan wawasan teoritis dan rekomendasi praktis bagi pengembangan governance di negara berkembang.

Kata Kunci: Governance, Stabilitas Negara, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between governance quality and state stability by comparing Scandinavian countries, known for their good governance practices, with Indonesia, which faces significant governance challenges. Governance encompasses aspects of public participation, accountability, transparency, and the rule of law. Data from Transparency International indicate that Scandinavian countries score above 80 on the corruption perception index, while Indonesia only reaches 34. These findings suggest that effective governance in Scandinavia contributes to high political and social stability. In contrast, challenges such as corruption and weak law enforcement in Indonesia lead to instability. This research focuses on identifying governance practices that can be adapted from Scandinavian countries to improve governance and stability in Indonesia, providing theoretical insights and practical recommendations for governance development in developing countries.

Keywords: Governance, State Stability, Public Participation.

PENDAHULUAN

Dalam kajian politik kontemporer, hubungan antara kualitas governance dan stabilitas negara merupakan tema yang sangat penting dan relevan. Governance yang baik diakui sebagai fondasi yang esensial untuk mencapai stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kondisi governance di negara-negara Skandinavia, yang dikenal dengan tata kelola pemerintahan yang sangat baik, dengan Indonesia, yang menghadapi tantangan serius dalam aspek-aspek governance. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini akan menggali bagaimana perbedaan dalam kualitas governance dapat mempengaruhi stabilitas dan perkembangan sosial di masing-masing negara.

Menurut UNDP (1997), governance mencakup proses yang digunakan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk menetapkan tujuan dan mengimplementasikan kebijakan. Governance mencakup berbagai elemen, seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Rothstein dan Teorell (2008) menekankan bahwa kualitas governance dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap institusi dan rendahnya tingkat korupsi. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas governance di berbagai negara. Misalnya, pada indeks 2022, negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark memperoleh skor di atas 80, menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah. Sementara itu, Indonesia hanya memperoleh skor 34, yang mencerminkan tantangan besar yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahannya.

Stabilitas negara adalah kondisi di mana struktur politik, ekonomi, dan sosial suatu negara berfungsi secara harmonis tanpa gangguan signifikan. Dalam konteks ini, kualitas governance memainkan peran krusial. Di negara-negara Skandinavia, stabilitas politik dan sosial yang tinggi sering kali dikaitkan dengan praktik governance yang baik, termasuk akuntabilitas dan partisipasi publik. Menurut World Happiness Report 2022, Norwegia, Denmark, dan Finlandia menduduki peringkat teratas dalam hal kebahagiaan masyarakat, yang mencerminkan bahwa governance yang baik berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di negara-negara ini rata-rata di bawah 5%, dan angka kemiskinan berada pada level yang sangat rendah, menciptakan lingkungan yang stabil dan produktif. Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan serius, seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan lemahnya penegakan hukum, yang berdampak negatif terhadap stabilitas politik dan sosial. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami ribuan kasus korupsi setiap tahunnya, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Penelitian oleh Aspinall (2015) menunjukkan bahwa konflik regional dan ketegangan sosial di Indonesia sering kali diperburuk oleh governance yang tidak efektif, mengakibatkan protes, kerusuhan, dan ketidakpuasan publik yang meluas.

Penelitian sebelumnya banyak membahas hubungan antara governance dan stabilitas negara, baik di konteks negara maju maupun berkembang. Penelitian oleh Helliwell dan Putnam (1999) menunjukkan bahwa kepercayaan sosial yang dibangun melalui governance yang baik berkontribusi terhadap stabilitas. Di negara-negara dengan governance yang kuat, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi pemerintah, yang pada gilirannya mengurangi tingkat ketidakpuasan dan protes. Sebagai contoh, indeks governance dunia yang dirilis oleh World Bank menunjukkan bahwa negara-negara seperti Swedia dan Finlandia memiliki skor tinggi dalam hal efektivitas pemerintah, partisipasi politik, dan supremasi hukum, yang berkontribusi pada tingkat konflik yang lebih rendah dan stabilitas yang lebih tinggi.

Namun, banyak penelitian yang dilakukan cenderung berfokus pada negara-negara maju tanpa mempertimbangkan tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian oleh Grindle (2007) menunjukkan bahwa banyak studi berfokus pada satu aspek governance, seperti korupsi, tanpa memperhitungkan dimensi lainnya, sehingga tidak memberikan gambaran komprehensif tentang dampak governance terhadap stabilitas. Ini menciptakan kesenjangan dalam literatur yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami bagaimana berbagai dimensi governance berinteraksi untuk memengaruhi stabilitas negara. Negara-negara Skandinavia, termasuk Norwegia, Swedia, dan Denmark, dikenal memiliki sistem governance yang efisien dan efektif. Menurut laporan World Bank Governance Indicators,

negara-negara ini memiliki skor tinggi dalam hal efektivitas pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas. Misalnya, pada tahun 2021, Norwegia memperoleh skor 97 untuk efektivitas pemerintah, mencerminkan bahwa pemerintahannya mampu memberikan layanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tingginya partisipasi politik, di mana lebih dari 80% populasi terdaftar memilih dalam pemilu, juga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Praktik governance yang baik di negara-negara ini tidak hanya meningkatkan stabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Data dari Eurostat menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia memiliki tingkat pengangguran yang rata-rata di bawah 5%, sedangkan tingkat kemiskinan berada pada level yang sangat rendah, dengan Finlandia mencatat angka kemiskinan di bawah 10%. Ini menunjukkan bahwa governance yang baik berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kemakmuran ekonomi, menciptakan fondasi yang kuat bagi stabilitas politik dan sosial.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas governance. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, seperti desentralisasi dan reformasi birokrasi, masalah mendasar seperti korupsi, ketidakadilan hukum, dan lemahnya partisipasi publik tetap menjadi penghalang. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 500 pejabat publik terjerat kasus korupsi, dengan total kerugian negara mencapai Rp 30 triliun. Ketidakpuasan publik terhadap layanan pemerintah sering kali mengarah pada protes dan konflik sosial. Misalnya, gelombang protes yang terjadi pada tahun 2019 terkait RUU Omnibus Law menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan dapat memicu instabilitas politik. Sebuah studi oleh Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-102 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi 2022. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan governance, seperti program anti-korupsi dan reformasi birokrasi, tantangan yang ada tetap signifikan. Tingginya tingkat korupsi dan lemahnya penegakan hukum menciptakan iklim yang tidak mendukung bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas sosial dan politik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review untuk menganalisis keterkaitan antara kualitas governance dan stabilitas negara di negara-negara Skandinavia dan Indonesia. Fokus utama akan diberikan pada dimensi governance, termasuk transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Data akan diambil dari berbagai sumber, termasuk indeks governance dari World Bank, indeks persepsi korupsi dari Transparency International, serta data statistik mengenai stabilitas politik dari Global Peace Index. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik governance yang dapat diadopsi oleh Indonesia untuk meningkatkan stabilitasnya. Dengan memahami bagaimana negara-negara Skandinavia berhasil menciptakan lingkungan yang stabil melalui governance yang baik, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip governance dari negara-negara Skandinavia dapat diadaptasi untuk meningkatkan stabilitas di Indonesia. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu politik tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perbaikan tata kelola di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan baru tentang penerapan prinsip-prinsip governance yang baik dalam konteks negara berkembang, dengan tujuan akhir meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas governance memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas negara. Melalui perbandingan antara negara-negara

Skandinavia dan Indonesia, penelitian ini menegaskan bahwa governance yang baik tidak hanya penting untuk menciptakan stabilitas politik, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam meningkatkan kualitas governance cukup besar, belajar dari praktik terbaik di negara-negara Skandinavia dapat memberikan jalan menuju perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga praktis untuk perbaikan tata kelola di Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian stabilitas yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis hubungan antara kualitas governance dan stabilitas negara di negara-negara Skandinavia dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) dan pendekatan komparatif. Menurut Creswell, desain penelitian kualitatif dengan metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks ini, penelitian akan membandingkan praktik governance di negara-negara Skandinavia (Norwegia, Swedia, Denmark) dengan Indonesia melalui analisis sistematis terhadap berbagai dokumen, laporan, dan publikasi ilmiah. Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam praktik governance serta dampaknya terhadap stabilitas negara. Kajian literatur merupakan tahap krusial dalam penyusunan rencana penelitian, yang bertujuan untuk menggali pemahaman tentang topik yang akan diteliti melalui telaah terhadap berbagai literatur yang relevan. Proses ini melibatkan pencarian dan analisis pustaka yang mencakup buku, jurnal, artikel, serta publikasi lain yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Kajian literatur sangat penting dalam menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, karena memberikan dasar teori yang kuat dan memperkaya wawasan peneliti mengenai variabel-variabel penelitian yang terkait dalam kajian literatur, peneliti tidak hanya mengidentifikasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga menggali teori-teori dan metode yang digunakan oleh peneliti lain yang relevan dengan topik yang diangkat.

Melalui kajian literatur, peneliti menyadari bahwa pengetahuan terus berkembang dan bahwa topik penelitian yang diangkat mungkin sudah pernah menjadi perhatian peneliti lain sebelumnya. Oleh karena itu, kajian literatur membantu peneliti untuk melihat temuan-temuan terkini dan memahami pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian peneliti dapat membangun penelitiannya berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, sekaligus mengeksplorasi celah atau area yang masih terbuka untuk penelitian lebih lanjut. Kajian literatur ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, kajian literatur bertujuan untuk memperkenalkan perkembangan baru dalam suatu bidang ilmu kepada masyarakat akademik, sehingga artikel-artikel yang dihasilkan dapat menjadi referensi penting bagi para peneliti di masa depan. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional dan terbitan tahunan seperti *Annual Review of Political Science* dapat menjadi acuan yang berguna bagi peneliti pemula yang tertarik dalam topik tertentu. Tujuan kedua adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti tentang topik penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, kajian literatur berfungsi untuk membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, memilih teori yang tepat, dan menentukan metode penelitian yang paling relevan dengan isu yang diangkat. Dalam penelitian ini, kajian literatur akan mengarahkan peneliti untuk memahami hubungan

antara kualitas tata kelola pemerintahan (governance) dan stabilitas negara, dengan fokus pada perbandingan antara negara-negara Skandinavia dan Indonesia. Dengan menganalisis hasil penelitian yang telah ada, peneliti dapat menilai apakah pendekatan yang digunakan sebelumnya dapat diterapkan atau dimodifikasi sesuai dengan konteks yang berbeda. Kajian literatur juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi gap yang ada dalam penelitian terdahulu, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang hubungan antara kualitas governance dan stabilitas negara di kedua wilayah tersebut. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini akan melakukan

kajian literatur dengan menganalisis artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional yang relevan selama periode 2019 hingga 2020. Dengan cara ini, peneliti berharap dapat menemukan kerangka teori dan metodologi yang tepat untuk digunakan dalam analisis perbandingan antara negara-negara Skandinavia dan Indonesia dalam hal kualitas governance dan stabilitas negara.

Jenis Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersifat dokumentatif. Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, namun melalui dokumen atau publikasi resmi. Sumber data dalam penelitian ini akan mencakup

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi. Menurut Lincoln dan Guba, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen-dokumen tertulis. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi sumber data: Mengidentifikasi publikasi, dan dokumen yang relevan dengan topik governance dan stabilitas negara.
2. Penelusuran literatur: Menggunakan database elektronik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect untuk menemukan sumber-sumber yang sesuai dengan kriteria penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (content analysis) dengan pendekatan kualitatif komparatif. Menurut Krippendorff analisis konten adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks terhadap konteks penggunaannya. Tahapan analisis data meliputi:

1. Reduksi data: Memilah dan memfokuskan data yang paling relevan dan signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2. Komparasi sistematis: Membandingkan praktik governance di negara Skandinavia dan Indonesia dengan memperhatikan:
 - Indikator kuantitatif (skor governance, indeks korupsi)
 - Konteks historis dan struktural
 - Dampak terhadap stabilitas negara
 - Interpretasi data: Menganalisis temuan untuk menghasilkan kesimpulan tentang hubungan antara kualitas governance dan stabilitas negara.
3. Penarikan kesimpulan: Merumuskan temuan penelitian dan implikasi praktis untuk perbaikan tata kelola di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip metodologis dari para ahli seperti Creswell, Ragin, dan Krippendorff untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Governance Negara Skandinavia Dan Indonesia

Kualitas governance atau kualitas tata kelola pemerintahan di negara-negara Skandinavia dan Indonesia dapat dianalisis melalui data yang diperoleh dari indikator Worldwide Governance Indicators (WGI). Data WGI yang digunakan adalah data terbaru dari tahun 2022 yang dapat diakses melalui situs resminya. Dalam hal ini, data diambil dari kolom "estimate", yang menunjukkan perkiraan kualitas governance dengan skala mulai dari sekitar -2,5 (mengindikasikan kualitas tata kelola yang lemah) hingga 2,5 (mengindikasikan tata kelola yang kuat). Data ini menyajikan gambaran umum tentang efektivitas tata kelola pemerintahan dari enam indikator penting.

Tabel 1 Worldwide Governance Indicators (WGI) tahun 2022

Nama Negara	Data dari Worldwide Governance Indicators (WGI)					
	Voice And Accountability	Political Stability No Violence	Government Effectiveness	Regulatory Quality	Rule Of Law	Control Of Corruption
Negara Skandinavia						
Norwegia	1,77	0,86	1,94	1,52	1,76	2,07
Swedia	1,52	0,90	1,57	1,68	1,69	2,06
Denmark	1,59	0,87	1,99	1,84	1,90	2,40
Negara Indonesia						
Indonesia	0,14	-0,44	0,44	0,21	-0,19	-0,43

Diolah penulis dari www.govindicators.org

Berdasarkan data dari tabel tersebut, negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark menunjukkan skor yang sangat tinggi pada semua indikator tata kelola pemerintahan, termasuk partisipasi dan akuntabilitas, stabilitas politik tanpa kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Ketiga negara ini secara konsisten mencatat skor yang mendekati atau melebihi angka 1,5 pada sebagian besar indikator, yang mencerminkan kinerja tata kelola yang sangat kuat. Di sisi lain, Indonesia memiliki skor yang jauh lebih rendah di hampir setiap aspek tata Kelola. Bahkan, beberapa indikator tata kelola di Indonesia berada pada skor negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia.

Selain indikator WGI, penilaian kualitas tata kelola juga diperoleh dari Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023. Indeks ini memberikan perspektif tambahan mengenai persepsi korupsi di berbagai negara, di mana nilai indeks yang lebih tinggi mencerminkan tingkat korupsi yang lebih rendah. Adapun data dari CPI 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023

Nama Negara	Skor	Rank
Negara Skandinavia		
Norwegia	84/100	4
Swedia	82/100	6
Denmark	90/100	1
Negara Indonesia		
Indonesia	34/100	115

Diolah penulis dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/>

Negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark memperoleh skor tinggi, yang menunjukkan tingkat korupsi yang rendah dan kualitas tata kelola yang kuat. Denmark menduduki peringkat pertama secara global, sementara Norwegia dan Swedia juga berada di peringkat teratas dengan skor yang mendekati sempurna. Sebaliknya, Indonesia memiliki skor yang jauh lebih rendah dan berada di peringkat 115, yang mencerminkan tantangan signifikan dalam pengendalian korupsi dan menunjukkan bahwa persepsi korupsi di Indonesia masih menjadi isu yang menonjol dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia.

Stabilitas Negara Skandinavia Dan Indonesia

Stabilitas negara-negara Skandinavia dan Indonesia dapat dievaluasi melalui berbagai indeks global yang menggambarkan kondisi perdamaian dan pembangunan manusia. Salah satu indeks yang digunakan adalah Global Peace Index (GPI) tahun 2024. GPI merupakan laporan yang dipublikasikan oleh Institute for Economics & Peace (IEP), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Australia. Indeks ini mengukur tingkat kedamaian relatif suatu negara atau wilayah, memberikan gambaran tentang posisi suatu negara dalam hal stabilitas dan ketenangan.

Tabel 3 Global Peace Index (GPI) tahun 2024

Nama Negara	Skor	Keterangan
Negara Skandinavia		
Norwegia	1.638	Tinggi
Swedia	1.782	Tinggi
Denmark	1.382	Sangat Tinggi
Negara Indonesia		
Indonesia	1.857	Tinggi

Diolah penulis dari <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/06/GPI-2024-web.pdf>

Berdasarkan data dari Global Peace Index (GPI) tahun 2024, ketiga negara Skandinavia—Norwegia, Swedia, dan Denmark—memiliki skor yang menunjukkan tingkat kedamaian yang tinggi, dengan Denmark mencapai tingkat kedamaian "Sangat Tinggi" dibandingkan dengan Norwegia dan Swedia. Sementara itu, Indonesia juga berada pada kategori "Tinggi" dalam indeks ini, namun dengan skor yang sedikit lebih tinggi dibandingkan negara-negara Skandinavia, yang mengindikasikan bahwa tingkat kedamaian relatif Indonesia masih tertinggal dari ketiga negara tersebut.

Selain GPI, digunakan juga Human Development Index (HDI) tahun 2022 sebagai indikator stabilitas. HDI adalah ukuran ringkasan dari pencapaian rata-rata dalam dimensi-dimensi utama pembangunan manusia, yakni kehidupan yang sehat dan panjang, tingkat pengetahuan, serta standar hidup yang layak. HDI dihitung sebagai rata-rata geometris dari indeks yang telah dinormalisasi untuk masing-masing dimensi tersebut.

Tabel 4 Human Development Index (HDI) tahun 2022

Nama Negara	Skor	HDI Rank
Negara Skandinavia		
Norwegia	83,4	2
Swedia	83,5	5
Denmark	81,9	5
Negara Indonesia		
Indonesia	0,713	112

Diolah penulis dari <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>

Data dari Human Development Index (HDI) tahun 2022 menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark memiliki skor yang sangat tinggi, dengan peringkat global di posisi teratas, yang mencerminkan pencapaian signifikan dalam pembangunan manusia. Ketiga negara tersebut memiliki nilai HDI di atas 80, yang mencerminkan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan yang sangat baik. Di sisi lain, Indonesia memiliki skor HDI yang lebih rendah, dengan peringkat 112 secara global, menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia di Indonesia masih memiliki ruang untuk peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat perbedaan mencolok dalam kualitas tata kelola (governance) antara negara-negara Skandinavia dan Indonesia, yang secara langsung berdampak pada stabilitas politik dan sosial masing-masing negara. Dalam indikator Worldwide Governance Indicators (WGI) tahun 2022, negara-negara Skandinavia menunjukkan kinerja yang sangat baik pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum, dengan skor tinggi dalam kategori Voice and Accountability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, dan Control of Corruption. Di sisi lain, skor Indonesia dalam indikator-indikator ini masih tergolong rendah, bahkan negatif dalam beberapa aspek seperti stabilitas politik, supremasi hukum, dan pengendalian korupsi. Perbedaan kualitas governance ini menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia berhasil menciptakan tata kelola yang kuat, yang merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas politik dan sosial mereka.

Secara teori, tata kelola yang baik dan efektif sangat berkaitan erat dengan stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara. Menurut konsep Good Governance, transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah (Widanti, 2022). Negara-negara Skandinavia telah mencapai transparansi tinggi yang dapat dilihat dalam Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023, di mana Norwegia, Swedia, dan Denmark menempati peringkat atas dunia dengan skor yang menunjukkan tingkat korupsi yang rendah. Hal ini menciptakan stabilitas politik yang kuat, sebagaimana terlihat pada skor tinggi mereka dalam Global Peace Index (GPI) 2024. Sebaliknya, Indonesia, dengan skor CPI yang jauh lebih rendah dan peringkat yang rendah dalam indikator pengendalian korupsi, menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam

mencapai tata kelola yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas sosial dan politik di negara tersebut.

Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan kelembagaan. Negara-negara Skandinavia dikenal dengan budaya pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai egalitarianisme, kepercayaan publik yang tinggi, dan konsensus dalam pengambilan keputusan, yang semuanya memperkuat struktur governance mereka (Ahlness, 2020). Indonesia, di sisi lain, menghadapi tantangan struktural seperti birokrasi yang kompleks, praktik korupsi yang tertanam, serta kurangnya penegakan hukum yang konsisten, yang menghambat peningkatan kualitas governance. Hal ini tercermin dalam data Human Development Index (HDI) 2022, di mana negara-negara Skandinavia memiliki skor HDI yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, yang menunjukkan pencapaian lebih besar dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, yang pada akhirnya turut memperkuat stabilitas sosial mereka.

Kualitas governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas negara, karena tata kelola yang baik menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencapai kedamaian dan kemakmuran dalam masyarakat (Bila, 2023). Ketika pemerintah mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan akan meningkat, sehingga mengurangi potensi konflik dan instabilitas. Negara-negara dengan kualitas governance yang tinggi, seperti negara-negara Skandinavia, menunjukkan stabilitas politik dan sosial yang lebih baik, sebaliknya, di negara dengan tata kelola yang buruk, seperti Indonesia, seringkali muncul tantangan besar dalam menjaga stabilitas akibat praktik korupsi, kurangnya transparansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas governance menjadi kunci untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas negara yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Data menunjukkan bahwa governance yang baik, yang ditandai oleh tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang tinggi, berkontribusi signifikan terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Sementara negara-negara Skandinavia berhasil menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera, Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi dan birokrasi yang lamban. Governance yang efektif di Skandinavia berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial yang tinggi. Sebaliknya, tantangan seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan. Penelitian ini berfokus pada pengidentifikasian praktik-praktik governance yang dapat diadaptasi dari negara-negara Skandinavia untuk meningkatkan tata kelola dan stabilitas di Indonesia, memberikan wawasan teoritis dan rekomendasi praktis bagi pengembangan governance di negara berkembang. Oleh karena itu, dengan memahami praktik-praktik baik dari negara-negara tersebut, Indonesia dapat mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas governance, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung perbaikan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlness, E. A. (2020). Vikings in World History The Legacy of the Ting: Viking Justice, Egalitarianism, and Modern Scandinavian Regional Governance. *World History Connected*, 17(2).
- Aspinall, E. (2015). Regional conflict and social tension in Indonesia: The role of governance and political stability. *Journal of Southeast Asian Politics*, 21(3), 157-175.
- Bila, A. (2023). Strategi Open Governance dalam Memperkuat Public Trust Terhadap Pemerintah

- Daerah (Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 21-28.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Dwi., A., B. 2021. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Tarumanegara*. 1-11
- Grindle, M. S. (2007). *Good governance: The concept and its application*. Cambridge University Press.
- Gubrium, Jaber F and James A. Holstein, 1992. "Qualitative Methods", dalam *Encyclopedia of Sociology*, Vol. 3. New York: Macmillan Publishing Company
- Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (1999). Education and social capital. *The American Economic Review*, 89(2), 318-322.
- Jary, D., & Jary, J. (1991). *The HarperCollins dictionary of sociology*. HarperPerennial. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=24180>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*.
- Lesmana Rian Andhika. 2017. Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*. 87-102
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*.
- Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 1(2), 27–36.
- Nanik., M. 2023. Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 46-62
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation methods* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Ragin, C. (1987). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*.
- Riswati. 2021 *IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DIGITALISASI TEKNOLOGI DI INDONESIA*. *Jurnal Media Demokrasi* . 1-15
- Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance*, 21(2), 165-190.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tjahjono, H. (2018). Literature review dalam penelitian sosial dan politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(1), 50-61.
- Tjahjono, H., K. (2018). Studi Literatur Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Pada Konsekuensinya Dengan Teknik Meta Analisis. *Jurnal Psikologi*, 35(1), 21–40.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. Community Organization, Training, Research, and Advocacy Institute (CO-TRAIN). Philippines. <https://digitallibrary.un.org/record/3831662?ln=en>.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.
- World Bank. (2022). *World governance indicators 2022*. World Bank. Diakses pada tanggal 26 November 2024 https://databank.worldbank.org/id/ceea4d8b?Report_Name=WGI-Table
- World Happiness Report. (2022). *World happiness report 2022*. Sustainable Development Solutions Network. Diakses pada tanggal 26 November 2024 <https://worldhappiness.report/news/why-finland-and-denmark-are-happier-than-the-us/>
- Zorya, K., A., B. Muhammad., F., Z 2024. Implementasi Sistem Kesejahteraan Skandinavia: Studi Perbandingan dan Potensinya di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. 1-8